



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

JARAK BEBAS BANGUNAN DAN PEMANFAATAN PADA DAERAH
SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan teknis dalam pembangunan bangunan, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur jarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada daerah sempadan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya, ketentuan mengenai jarak bebas Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Jarak Bebas Bangunan dan Pemanfaatan pada Daerah Sempadan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARAK BEBAS BANGUNAN DAN PEMANFAATAN PADA DAERAH SEMPADAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi Tata Bangunan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi Tata Bangunan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
7. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
12. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.

13. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
14. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. terciptanya ketertiban bangunan;
 - b. terciptanya lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan;
 - c. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengaturan jarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada garis sempadan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jarak bebas bangunan;
- b. pemanfaatan pada daerah sempadan;
- c. pengendalian;
- d. ketentuan lain-lain; dan
- e. ketentuan peralihan.

BAB IV
JARAK BEBAS BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan wajib menaati ketentuan jarak bebas bangunan.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan ditetapkan dalam bentuk:
 - a. Garis Sempadan Bangunan dengan tepi jalan, tepi saluran irigasi, tepi situ/danau/mata air, jalan kereta api, dan/atau tepi jaringan listrik; dan
 - b. Jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kavling, per persil dan/atau per kawasan.
- (3) Persyaratan jarak bebas bangunan atau bagian bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan dengan Tepi Jalan

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Bangunan dengan tepi jalan diukur dari tepi Ruang Milik Jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	RUANG MILIK JALAN	GARIS SEMPADAN BANGUNAN DENGAN TEPI RUANG MILIK JALAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	sampai dengan 4 m	2,5 m
2	lebih dari 4 m s.d 6 m	3 m
3	lebih dari 6 m s.d 8 m	4 m
4	lebih dari 8 m s.d 10 m	5 m
5	lebih dari 10 m s.d 12 m	6 m
6	lebih dari 12 m s.d 14 m	7 m
7	lebih dari 14 m s.d 16 m	8 m
8	lebih dari 16 m s.d 18 m	9 m
9	lebih dari 18 m s.d 20 m	10 m
10	lebih dari 20 m	15 m

- (2) Khusus untuk jalan yang berada di lingkungan perumahan yang memiliki Ruang Milik Jalan lebih dari 4 (empat) meter, maka Garis Sempadan Bangunan dengan tepi jalan ditetapkan 2,5 (dua koma lima) meter.
- (3) Dalam hal pada satu ruas jalan terdapat lebar Ruang Milik Jalan yang berbeda, maka Garis Sempadan Bangunan ditetapkan berdasarkan lebar Ruang Milik Jalan yang dominan pada ruas jalan dimaksud.
- (4) Garis Sempadan Bangunan untuk ruas jalan di Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Garis Sempadan Bangunan untuk ruas jalan yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (6) Dalam rangka pelayanan perizinan, maka sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Garis Sempadan Bangunan yang digunakan sebagai dasar penerbitan izin berpedoman pada rekomendasi teknis Kepala Dinas.
- (7) Dalam menyusun rekomendasi teknis, Kepala Dinas wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (8) Untuk menjamin kepastian hukum, maka segera setelah diketahuinya ruas jalan yang belum ditetapkan Garis Sempadan Bangunannya dari tepi jalan, Kepala Dinas menyampaikan usulan perubahan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Garis sempadan pagar dengan tepi jalan ditetapkan pada batas Ruang Milik Jalan dengan batas persil.
- (2) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 2 (dua) meter, dengan ketentuan bagian yang tidak tembus pandang paling tinggi 1 (satu) meter dari permukaan tanah.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan dengan Tepi Saluran Irigasi

Pasal 7

- (1) Garis Sempadan Bangunan dengan tepi saluran Irigasi, meliputi :
 - a. Garis Sempadan Bangunan dengan tepi saluran Irigasi tak bertanggung; dan
 - b. Garis Sempadan Bangunan dengan tepi saluran Irigasi bertanggung.

- (2) Garis Sempadan Bangunan dengan tepi saluran Irigasi tak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) meter, untuk saluran dengan kedalaman kurang dari 1 (satu) meter;
 - b. 2 (dua) meter, untuk saluran dengan kedalaman di atas 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
 - c. 3 (tiga) meter, untuk saluran dengan kedalaman di atas 2 (dua) meter.
- (3) Garis Sempadan Bangunan dengan tepi saluran Irigasi tak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi atau jika tidak terdapat parit drainase, diukur dari tepi kiri dan kanan saluran irigasi.
- (4) Garis Sempadan Bangunan dengan tepi saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) meter, untuk saluran dengan ketinggian tanggul kurang dari 1 (satu) meter;
 - b. 2 (dua) meter, untuk saluran dengan ketinggian tanggul di atas 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
 - c. 3 (tiga) meter, untuk saluran dengan ketinggian tanggul lebih dari 2 (dua) meter.
- (5) Garis Sempadan Bangunan dengan tepi saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur dari sisi luar kaki tanggul di kanan dan kiri saluran irigasi.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan
dengan Tepi Danau/Situ/Mata Air

Pasal 8

- (1) Garis Sempadan Bangunan dengan tepi danau/situ ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Garis Sempadan Bangunan dengan tepi mata air ditetapkan paling sedikit 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan dengan Tepi Rel Kereta Api

Pasal 9

Garis Sempadan Bangunan dengan tepi rel Kereta Api ditetapkan dengan jarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari :

- a. as jalan rel terdekat, apabila jalan rel kereta api lurus;
- b. kaki tanggul, apabila rel kereta api terletak di tanah timbunan;
- c. puncak galian tanah atau atas serongan, apabila rel kereta api terletak di dalam galian; dan
- d. as jalan rel kereta api, apabila kereta api terletak pada tanah datar.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan dengan Tepi Jaringan Listrik

Pasal 10

Garis Sempadan Bangunan dengan tepi jaringan listrik merupakan ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar jaringan listrik dengan tanah dan benda lain yang ditetapkan sebagai berikut :

NO.	LOKASI	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	SALURAN KABEL	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bangunan Beton	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
2.	Pompa Bensin	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
3.	Penimbunan Bahan Bakar	50 m	20 m	50 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
4.	Pagar	3 m	20 m	3 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
5.	Lapangan Terbuka	6,5 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
6.	Jalan Raya	8 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
7.	Pepohonan	3,5 m	20 m	8,5 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
8.	Bangunan Tahan Api	3,5 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
9.	Rel Kereta Api	8 m	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
10.	Jembatan Besi/ Tangga Besi/ Kereta Listrik	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
11.	Dari Titik Tertinggi Tiang Kapal	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
12.	Lapangan Olah Raga	2,5 m	20 m	14 m	20 m	20 m	20 m	20 m
13.	SUTT lainnya penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi dan kereta gantung	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m

Bagian Ketiga

Jarak Antara Bangunan

Pasal 11

- (1) Jarak antara bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberlakukan untuk bangunan bertingkat yang memiliki paling sedikit 4 (empat) lantai.

- (2) Untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jarak antara bangunan ditetapkan paling sedikit 4 (empat) meter dari lantai dasar.
- (3) Jarak antara bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 0,50 (nol koma lima) meter setiap penambahan lantai/tingkat bangunan sampai mencapai jarak terjauh 12,5 (dua belas koma lima) meter.

BAB V

PEMANFAATAN PADA DAERAH SEMPADAN

Pasal 12

Daerah sempadan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagai berikut :

- a. daerah sempadan bangunan dengan tepi jalan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi :
 1. median jalan;
 2. perkerasan jalan;
 3. bahu jalan, terdiri dari :
 - a) parkir tepi jalan;
 - b) trotoar;
 - c) fasilitas lalu lintas/ perlengkapan jalan;
 - d) akses masuk/ keluar;
 - e) drainase/ saluran air hujan;
 4. jaringan utilitas; dan
 5. tiang reklame.
- b. daerah sempadan bangunan dengan tepi sungai/saluran irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, meliputi :
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. pemasangan papan penyuluhan, peringatan dan rambu-rambu pekerjaan; dan
 6. pagar untuk pengamanan persil, tetapi harus menyediakan jalan inspeksi dengan lebar tidak kurang dari 1 (satu) meter.
- c. daerah sempadan bangunan dengan tepi danau/situ/mata air dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi :
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan atau dermaga;
 3. kegiatan pariwisata dengan bangunan non-permanen;
 4. jalan menuju lokasi; dan

5. pagar untuk pengamanan persil, tetapi harus menyediakan jalan inspeksi dengan lebar tidak kurang dari 1 (satu) meter.
- d. daerah sempadan bangunan dengan tepi jaringan listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi :
 1. pekerasan jalan;
 2. taman;
 3. ruang terbuka hijau;
 4. sarana parkir dan trotoar;
 5. rambu-rambu lalu lintas;
 6. jaringan utilitas; dan
 7. saluran air.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian Garis Sempadan Bangunan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan data-data yang diperlukan kepada SKPD untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal terdapat bangunan yang berbatasan dengan jalan dan sungai, saluran irigasi, danau/situ/mata air, rel kereta api dan/ atau jaringan listrik, maka perhitungannya disesuaikan dengan garis sempadan terluar.

Pasal 16

Untuk mewujudkan keharmonisan pemanfaatan bangunan dengan lingkungan sekitarnya, pendirian bangunan pada kawasan perumahan yang berbatasan dengan sungai, saluran yang memiliki lebar lebih dari 2 (dua) meter, danau/situ/mata air dan/atau rel kereta api, maka bangunan tersebut harus menghadap ke

sungai, saluran yang memiliki lebar lebih dari 2 (dua) meter, danau/situ/mata air dan/atau rel kereta api.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk bangunan yang sudah memiliki izin, namun tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat bangunan tersebut dilakukan pemugaran yang volumenya mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas bangunan yang ada.
- (2) Untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka diberlakukan ketentuan sesuai dengan keberadaannya terkini.
- (3) Apabila bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan akan dilakukan pemugaran, maka penetapan garis sempadan bangunan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 295

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
JARAK BEBAS BANGUNAN DAN
PEMANFAATAN PADA DAERAH
SEMPADAN

GARIS SEMPADAN BANGUNAN DENGAN TEPI JALAN

NO. URUT	NAMA RUAS	KECAMATAN	GBS TEPI JALAN
1	2	3	4
1	Jl. Babakan	Bungursari	3,00
2	Jl. Babakan Jawa - Gn Manggu	Bungursari	3,00
3	Jl. Bantargedang	Bungursari	3,00
4	Jl. Bantarsari - Gn. Goong	Bungursari	4,00
5	Jl. Bungursari	Bungursari	3,00
6	Jl. Bungursari Cipeuteuy	Bungursari	3,00
7	Jl. Cibunigeulis	Bungursari	3,00
8	Jl. Cibunigeulis II	Bungursari	3,00
9	Jl. Cibunigeulis III	Bungursari	3,00
10	Jl. Cihurip I	Bungursari	3,00
11	Jl. Cihurip II	Bungursari	3,00
12	Jl. Cijolang	Bungursari	3,00
13	Jl. Cikondang	Bungursari	3,00
14	Jl. Gandok I	Bungursari	3,00
15	Jl. Gandok II	Bungursari	3,00
16	Jl. Gandok-Pasir Angin	Bungursari	3,00
17	Jl. Gn Cihcir I	Bungursari	3,00
18	Jl. Gn Cihcir II	Bungursari	3,00
19	Jl. Gn. Kokosan	Bungursari	3,00
20	Jl. Ir. H. Djuanda	Bungursari	8,00
21	Jl. Leuwibudah	Bungursari	3,00
22	Jl. Leuwihieum	Bungursari	4,00
23	Jl. Leuwikidang	Bungursari	3,00
24	Jl. Leuwimalang	Bungursari	3,00
25	Jl. Lewo Babakan	Bungursari	3,00
26	Jl. Panyamanan Depok	Bungursari	3,00
27	Jl. Pasir Angin	Bungursari	3,00
28	Jl. Ranca Sepat	Bungursari	3,00

NO. URUT	NAMA RUAS	KECAMATAN	GBS TEPI JALAN
1	2	3	4
29	Jl. Rancageneng I	Bungursari	3,00
30	Jl. Rancageneng II	Bungursari	3,00
31	Jl. Rancasenggang	Bungursari	3,00
32	Jl. Ranjeng	Bungursari	3,00
33	Jl. Setiarasa	Bungursari	3,00
34	Jl. Sukamulya III	Bungursari	3,00
35	Jl. Sukarindik Bungursari	Bungursari	3,00
36	Jl. Sukarindik III	Bungursari	3,00
37	Jl. Terusan Cimuncang	Bungursari	4,00
38	Jl. Babakan Selakaso	Bungursari-Cihideung	3,00
39	Jl. Sindang Jaya	Bungursari-Cihideung- Mangkubumi	4,00
40	Jl. Cipeuteuy-Cinangsi-Cihideung	Bungursari-indihiang	3,00
41	Jl. Sukarindik	Bungursari-Indihiang	3,00
42	Jl. Tundagan	Bungursari-Mangkubumi	3,00
43	Jl. Sukasari	Bungursari-Tawang	5,00
44	Jl. Irigasi Cibanjara	Bunngursari- Mangkubumi	3,00
45	Jl. Argasari	Cihideung	3,00
46	Jl. Argasari I	Cihideung	5,00
47	Jl. Asrama Nyantong	Cihideung	3,00
48	Jl. Bantar	Cihideung	3,00
49	Jl. Bbk Payung I	Cihideung	3,00
50	Jl. Bbk Payung II	Cihideung	3,00
51	Jl. Bbk Payung III	Cihideung	3,00
52	Jl. Bebedilan	Cihideung	3,00
53	Jl. BKR	Cihideung	5,00
54	Jl. Cempaka Warna	Cihideung	4,00
55	Jl. Cibaregbeg	Cihideung	3,00
56	Jl. Cieunteung	Cihideung	5,00
57	Jl. Cieunteung Gede	Cihideung	3,00
58	Jl. Cihideung	Cihideung	7,00
59	Jl. Cihideung Balong	Cihideung	7,00
60	Jl. Cilembang	Cihideung	4,00
61	Jl. Cipicung	Cihideung	3,00
62	Jl. Dadaha	Cihideung	4,00

NO. URUT	NAMA RUAS	KECAMATAN	GBS TEPI JALAN
1	2	3	4
63	Jl. Empang	Cihideung	5,00
64	Jl. Empang Sari	Cihideung	3,00
65	Jl. Ibu Apipah	Cihideung	4,00
66	Jl. Jiwa Besar	Cihideung	3,00
67	Jl. Kajaksan	Cihideung	3,00
68	Jl. Komarasari I	Cihideung	3,00
69	Jl. Komarasari II	Cihideung	3,00
70	Jl. Komarasari III	Cihideung	2,50
71	Jl. Layung Sari	Cihideung	2,50
72	Jl. Lingkar Dadaha	Cihideung	3,00
73	Jl. Lukmanul Hakim	Cihideung	4,00
74	Jl. Margaluyu	Cihideung	6,00
75	Jl. Mayor SL.Tobing	Cihideung	7,00
76	Jl. Mayor Utarya	Cihideung	6,00
77	Jl. Mesjid Agung	Cihideung	7,00
78	Jl. Mitra Batik	Cihideung	7,00
79	Jl. Nagarawangi	Cihideung	6,00
80	Jl. Panututan	Cihideung	4,00
81	Jl. Panyerutan	Cihideung	6,00
82	Jl. Pasar Baru I	Cihideung	6,00
83	Jl. Pasar Baru II	Cihideung	6,00
84	Jl. Pasar Kidul	Cihideung	6,00
85	Jl. Pasar Rel	Cihideung	7,00
86	Jl. Pasar Wetan	Cihideung	8,00
87	Jl. Paseh	Cihideung	5,00
88	Jl. Pataruman	Cihideung	5,00
89	Jl. Pemuda	Cihideung	5,00
90	Jl. Perintis Kemerdekaan	Cihideung	6,00
91	Jl. Pertanian	Cihideung	3,00
92	Jl. Pesantren AL Misbah I	Cihideung	3,00
93	Jl. Pesantren AL Misbah II	Cihideung	2,50
94	Jl. R. Ikik Wiradikarta	Cihideung	5,00
95	Jl. R.E. Jaelani	Cihideung	4,00
96	Jl. Rah Witono	Cihideung	6,00
97	Jl. Riung Gunung	Cihideung	3,00

NO. URUT	NAMA RUAS	KECAMATAN	GBS TEPI JALAN
1	2	3	4
98	Jl. Riung Kuntul	Cihideung	3,00
99	Jl. Rumah Sakit Umum	Cihideung	6,00
100	Jl. Selakaso	Cihideung	5,00
101	Jl. Siliwangi	Cihideung	5,00
102	Jl. Sukalaya Barat	Cihideung	4,00
103	Jl. Sukalaya I	Cihideung	4,00
104	Jl. Sukalaya II	Cihideung	4,00
105	Jl. Sukalaya III	Cihideung	4,00
106	Jl. Sukawarni	Cihideung	3,00
107	Jl. Taman Harapan	Cihideung	3,00
108	Jl. Tentara Pelajar	Cihideung	5,00
109	Jl. Terusan BCA	Cihideung	3,00
110	Jl. Veteran	Cihideung	7,00
111	Jl. Yuda Dharma	Cihideung	2,50
112	Jl. Yudanegara	Cihideung	8,00
113	Jl. Bojong	Cipedes	4,00
114	Jl. Bojong Kaler	Cipedes	3,00
115	Jl. Bojong sari	Cipedes	3,00
116	Jl. Bojong Tengah	Cipedes	4,00
117	Jl. Buninagara I	Cipedes	4,00
118	Jl. Buninagara II	Cipedes	3,00
119	Jl. Buninagara III	Cipedes	3,00
120	Jl. Burujul I	Cipedes	4,00
121	Jl. Burujul II	Cipedes	3,00
122	Jl. Burujul III	Cipedes	3,00
123	Jl. Cibogor-Benda-Cigeureung	Cipedes	5,00
124	Jl. Cikanyere	Cipedes	3,00
125	Jl. Cimuncang	Cipedes	3,00
126	Jl. Cipedes I	Cipedes	4,00
127	Jl. Cipedes II	Cipedes	3,00
128	Jl. Dr. Moch. Hatta	Cipedes	8,00
129	Jl. Dudi Duriatman	Cipedes	3,00
130	Jl. Gudang Jero I	Cipedes	3,00
131	Jl. Gudang Jero II	Cipedes	3,00
132	Jl. Gudang Jero III	Cipedes	3,00

NO. URUT	NAMA RUAS		KECAMATAN	GBS TEPI JALAN
1	2		3	4
133	Jl.	Gudang Pasantren	Cipedes	3,00
134	Jl.	H. Ma'mun Sodik	Cipedes	3,00
135	Jl.	Hanoman	Cipedes	3,00
136	Jl.	Kadupugur-Tonjong	Cipedes	4,00
137	Jl.	Kapt. Naseh	Cipedes	4,00
138	Jl.	KH. Muhammad Suja'i	Cipedes	4,00
139	Jl.	Kol. H. Utuy Subandi	Cipedes	3,00
140	Jl.	Kresna	Cipedes	2,50
141	Jl.	Kudang Pesantren	Cipedes	2,50
142	Jl.	Kumbakarna	Cipedes	2,50
143	Jl.	Letda Lili Rochli	Cipedes	3,00
144	Jl.	Leuwianyar	Cipedes	4,00
145	Jl.	Leuwidahu	Cipedes	4,00
146	Jl.	Lt. Harun	Cipedes	9,00
147	Jl.	Mancagar	Cipedes	3,00
148	Jl.	Mayor Elang Subandar	Cipedes	4,00
149	Jl.	Nusa Indah II	Cipedes	2,50
150	Jl.	Nusa Indah Raya	Cipedes	4,00
151	Jl.	Palasara	Cipedes	2,50
152	Jl.	Paledang	Cipedes	3,00
153	Jl.	Pandu	Cipedes	2,50
154	Jl.	Panglayungan II	Cipedes	3,00
155	Jl.	Panglayungan III	Cipedes	3,00
156	Jl.	Panunggal	Cipedes	4,00
157	Jl.	Parahyangan Raya	Cipedes	4,00
158	Jl.	Perum Bumi Resik Indah	Cipedes	6,00
159	Jl.	R.E. Martadinata	Cipedes	6,00
160	Jl.	Rancabango	Cipedes	3,00
161	Jl.	Sukamulya I	Cipedes	3,00
162	Jl.	Sukamulya II	Cipedes	3,00
163	Jl.	Sukaresi	Cipedes	3,00
164	Jl.	Suyadana	Cipedes	4,00
165	Jl.	Kalangsari	Cipedes-Cihideung	3,00
166	Jl.	Bojong Jengkol	Indihiang	4,00
167	Jl.	Bojong kupa	Indihiang	3,00

NO. URUT	NAMA RUAS	KECAMATAN	GBS TEPI JALAN
1	2	3	4
168	Jl. Bojong Kupa - Cibungkul	Indihiang	3,00
169	Jl. Brigjen Wasita Kusuma	Indihiang	10,00
170	Jl. Cibungkul	Indihiang	3,00
171	Jl. Cigeureng	Indihiang	4,00
172	Jl. Cikoneng I	Indihiang	3,00
173	Jl. Cikoneng II	Indihiang	3,00
174	Jl. Cinehel	Indihiang	4,00
175	Jl. Cipapagan	Indihiang	3,00
176	Jl. Cirapih	Indihiang	3,00
177	Jl. Ciropoh	Indihiang	4,00
178	Jl. Cisuta Sindang Hurip	Indihiang	3,00
179	Jl. Letjen Ibrahiem Adjie	Indihiang	7,00
180	Jl. Leuwidahu Kaler	Indihiang	3,00
181	Jl. Lingkar Terminal	Indihiang	5,00
182	Jl. Mang Koko (Sindangpalay)	Indihiang	3,00
183	Jl. Mangkoko - Pasantren	Indihiang	3,00
184	Jl. Mumunggang	Indihiang	4,00
185	Jl. Mutiara	Indihiang	4,00
186	Jl. Pamijahan	Indihiang	3,00
187	Jl. Panyingkiran	Indihiang	4,00
188	Jl. Parakan Honje	Indihiang	4,00
189	Jl. Parakannyasag I	Indihiang	3,00
190	Jl. Pasanggrahan	Indihiang	3,00
191	Jl. Pasar Indihiang	Indihiang	3,00
192	Jl. Salamnunggal-Mumunggang	Indihiang	3,00
193	Jl. Sampang Tanjung	Indihiang	3,00
194	Jl. Sindanghayu	Indihiang	3,00
195	Jl. Sirnagalih	Indihiang	3,00
196	Jl. Sukajaya Nangerok	Indihiang	3,00
197	Jl. Sukaratu	Indihiang	3,00
198	Jl. Sukasirna	Indihiang	3,00
199	Jl. Tajur	Indihiang	4,00
200	Jl. Mangkubumi-Indihiang	Indihiang-Mangkubumi	15,00
201	Jl. A. Yani	Tawang	4,00
202	Jl. Babakan Domba	Tawang	2,50

NO. URUT	NAMA RUAS	KECAMATAN	GBS TEPI JALAN
1	2	3	4
203	Jl. Babakan Siliwangi	Tawang	3,00
204	Jl. Bebedahan	Tawang	3,00
205	Jl. Bebedahan II	Tawang	3,00
206	Jl. Benda	Tawang	4,00
207	Jl. Cendrawasih	Tawang	4,00
208	Jl. Cikalang Girang	Tawang	3,00
209	Jl. Cikalang Tengah	Tawang	4,00
210	Jl. Cikunten Indah	Tawang	3,00
211	Jl. Cilolohan	Tawang	3,00
212	Jl. Cimulu	Tawang	6,00
213	Jl. Ciromban	Tawang	3,00
214	Jl. Dewi Sartika	Tawang	5,00
215	Jl. DR. Sukarjo	Tawang	7,00
216	Jl. Gunung Sari	Tawang	3,00
217	Jl. Jajaway Kecil	Tawang	3,00
218	Jl. Kamasan	Tawang	2,50
219	Jl. Kantoran	Tawang	4,00
220	Jl. Kapt. Didi Effendi	Tawang	3,00
221	Jl. Kebangsaan	Tawang	3,00
222	Jl. Kebon Tiwu I	Tawang	2,50
223	Jl. Kebon Tiwu II	Tawang	2,50
224	Jl. Kebon Tiwu III	Tawang	3,00
225	Jl. Kehutanan	Tawang	3,00
226	Jl. Kol. Abdullah Saleh	Tawang	4,00
227	Jl. Laswi	Tawang	4,00
228	Jl. Laswi Residen Raya	Tawang	4,00
229	Jl. Letjen Mashudi	Tawang	9,00
230	Jl. Letjen. Mashudi - Rajawali	Tawang	3,00
231	Jl. Letkol. Komir Kartaman	Tawang	4,00
232	Jl. Listrik	Tawang	3,00
233	Jl. Macan	Tawang	2,50
234	Jl. Manglid	Tawang	2,50
235	Jl. Margasari	Tawang	3,00
236	Jl. Merdeka	Tawang	3,00
237	Jl. Noenoeng Tisnasapoetra	Tawang	4,00

NO. URUT	NAMA RUAS	KECAMATAN	GBS TEPI JALAN
1	2	3	4
238	Jl. Otto Iskandardinata	Tawang	8,00
239	Jl. Pabrik Es	Tawang	3,00
240	Jl. Padasuka	Tawang	3,00
241	Jl. Pancasila	Tawang	3,00
242	Jl. Pasar Pancasila	Tawang	3,00
243	Jl. Pasundan	Tawang	3,00
244	Jl. Pegadaian	Tawang	4,00
245	Jl. Pendopo	Tawang	3,00
246	Jl. Perum Batara	Tawang	4,00
247	Jl. Peta	Tawang	4,00
248	Jl. RAA Wiratanuningrat	Tawang	8,00
249	Jl. Rasamala	Tawang	3,00
250	Jl. Rumah Sakit I	Tawang	5,00
251	Jl. Sapta Marga	Tawang	5,00
252	Jl. SKP	Tawang	4,00
253	Jl. Stasion	Tawang	4,00
254	Jl. Sukagalih	Tawang	3,00
255	Jl. Sukanegara I	Tawang	3,00
256	Jl. Sukanegara II	Tawang	3,00
257	Jl. Sule Setianegara	Tawang	4,00
258	Jl. Sumelap	Tawang	3,00
259	Jl. Sutisna Senjaya	Tawang	8,00
260	Jl. Taman Makam Pahlawan	Tawang	4,00
261	Jl. Tanuwijaya	Tawang	4,00
262	Jl. Tarumanegara	Tawang	6,00
263	Jl. Tawangsari	Tawang	5,00
264	Jl. Gunung Roay I	Tawang	4,00
265	Jl. Gunung Roay II	Tawang	4,00
266	Jl. Galunggung	Tawang-cihideung	6,00
267	Jl. Gunung Sabeulah	Tawang-Cihideung	6,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN